BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada senin 16 November 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR RI, Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran kode etik Anggota DPR. Laporan terkait skandal pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kasus "Papa Minta Saham".

Laporan dilandasi bukti rekaman pembicaraan antara Novanto dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Dalam pertemuan tersebut, mereka membicarakan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Nama Luhut Binsar Panjaitan (MENKO POLHUKAM) juga disebutkan sebanyak 66 kali dalam rekaman tersebut.

Kasus "Papa Minta Saham" ini kemudian ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan menggelar rangkaian persidangan untuk mengadili Setya Novanto. MKD sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertugas untuk menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhan martabat DPR.

Yang menarik adalah peristiwa-peristiwa yang mengiringi jalannya sidang-sidang yang digelar oleh MKD. Persidangan ini seharusnya

menegakan Kehormatan Dewan, namun banyak kejadian yang dinilai bermuatan politis. Wajar saja karena anggota MKD juga berasal dari fraksi politik yang mau tidak mau punya agenda partai yang harus diemban. Dari pihak terlapor, Setya Novanto yang berasal dari partai Golkar selalu punya cara untuk membela diri. Ia tidak sendiri, ada kolega politik dibelakangnya. Termasuk anggota fraksinya di dalam MKD.

Pers yang dikenal sebagai mata publik tidak tinggal diam. Hampir semua media di Indonesia meliput persidangan dan menjadikannya berita utama karena nilai beritanya yang tinggi. "Kasus Papa Minta Saham" menyangkut asset berharga milik Indonesia yaitu tambang emas di Irian Jaya yang telah lama menjadi buah bibir dimasyarakat, perihal pengolahannya oleh Freepot yang tidak sama sekali menguntungkan bangsa kita. Ditambah janji Presiden berupa komitmen berdikari yang sangat diharapkan bisa terwujud. Namun justru terjadi kasus pencatutan nama Presiden dalam pertemuan yang membahas komisi perpanjangan kontrak karya Freeport dan pelakunya adalah Ketua Dewan wakil aspirasi rakyat, Setya Novanto.

Perhatian masyarakat akan sidang MKD ini tidak lepas dari peran media karena media merupakan sumber informasi yang sangat dominan, terutama televisi. Media turut mempengaruhi konstrusksi yang terbentuk dimasyarakat atau khalayak media, yang kemudian akan membentuk opini publik terkait jalannya sidang. Namun begitu, media mempunyai sudut pandang sendiri dalam menafsirkan suatu peristiwa. Media bukanlah

sekedar saluran yang bebas, tetapi juga konstruksi yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihaknya. Media dipandang sebagai pembentuk konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya (Eriyanto, 2002:36).

Persidangan MKD diwarnai dengan berbagai kontroversi, misalnya saat mengadili Novanto sidang dilakukan secara tertutup. Tertutupnya persidangan saat mengadili Setya Novanto sangat disayangkan. Pasalnya, tertutupnya persidangan menimbulkan pertanyaan besar di benak publik. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Akhiar Salmi menilai tertutupnya sidang tersebut memperburuk citra DPR, ini menimbulkan spekulasi masyarakat. Apalagi dua persidangan sebelumnya dilakukan secara terbuka, ini bukan hal positif terhadap lembaga DPR. Justru menimbulkan penilaian tidak bagus terhadap MKD itu sendiri (http://www.beritadunia.net/lintaswarta/pengkajian/sidang-tertutup-setya-novanto-makin-memperburuk-citra-dpr diakses pada 25 Desember 2015 pukul 20.00WIB).

Kejadian-kejadian controversial ini lah yang menimbulkan spekulasi-spekulasi di tengah masyarakat yang kemudian sangat mudah ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Seperti misalnya kepentingan politik, untuk menjatuhkan lawan atau membela kawan. Media dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi namun juga sebagai sarana politikus untuk melakukan komunikasi politik yang berupa konfirmasi ataupun kritik-kritik pedas,

dengan tujuan mempengaruhi pendapat khalayak. Media memang dikenal mempunyai kekuatan untuk membentuk konstruksi tentang peristiwa atau tokoh tertentu termasuk mengenai sidang MKD beserta tokoh-tokoh yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, media yang diambil sebagai objek penelitian adalah Metro TV dan TV One. Dua televisi berita ini gencar sekali memberitakan sidang MKD. Berita-berita yang ditayangkan juga cenderung berbeda satu sama lain. Metro TV sempat dilaporkan kuasa hukum Setya Novanto karena dinilai tidak berimbang. Ia menilai berita-berita Metro TV provokatif, diskriminatif dan tendensius. Kuasa hukum Setya Novanto, Razman Arif Nasution juga menuding Metro TV membocorkan sidang MKD yang dilaksanakan secara tertutup.

> Razman menuding Metro TV telah sengaja membocorkan dan menayangkan hasil pembicaraan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menghadirkan Setya Novanto. Padahal, sidang bersifat sifatnya tertutup. Ia pun menuding Metro TV bekerjasama dengan orang yang ada di dalam MKD. (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/711027-pengacara-novanto-laporkan-metro-tv-ke-dewan-pers, diakses pada pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 20.00 WIB).

Peristiwa itu menunjukan adanya pembelaan diri dari pihak Setya Novanto. Perihal sidang tertutup, Metro TV sendiri menurunkan berita dalam program *Breaking News* dengan *headline* "Mengadili Etika Setya Novanto". Berita diawali dengan memutar tayangan tentang persidangan MKD disaat mengadili Setya Novanto dilakukan secara tertutup dan menampilkan cuplikan wawancara dengan Ruhut Sitompul Anggota DPR

dari fraksi DEMOKRAT yang menolak sikap MKD menutup pelaksanaan sidang MKD.

> Ruhut menyatakan bahwa tidak usah ditutupi lagi, publik sudah tau dan bisa menilai. Menurutnya sebagai anggota DPR malu terhadap kinerja MKD. Selain itu Metro TV menyatakan yang harus MKD jaga adalah kehormatan dari institusi dan anggotanya. Tapi yang terjadi hari ini masyarakat sangat kecewa dan opini publik sangat keras mengecam karena adanya perbedaan sidang dengan sebelumnya.
> (https://www.youtube.com/watch?v=eRsN6NaDsYc diakses pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 20.00 WIB).

Angle yang berbeda diterapkan oleh TV One dalam program Kabar Petang pada 7 Desember 2015 pukul 17.00 WIB. TV One menyiarkan wawancara pimpinan MKD yang berjudul "Sidang MKD". Dalam tayangannya tersebut dipaparkan pendapat wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang menilai sidang MKD harus dilakukan secara tertutup jika mengkaji pada undang-undang (UU). Fadli Zon menyatakan Novanto belum tentu bersalah, jadi sidang tidak perlu dilakukan secara terbuka. Menurutnya kita sebagai Negara Republik Indonesia (RI) punya aturan konstitusi dan UU menyatakan sidang tersebut harus tertutup. Begitupun dengan Fahri Hamzah, kita harus mengikuti UU. Sidang MKD ini sifatnya etik, dan itu artinya *private* karena itu tidak layak untuk dikonsumsi dan dipertontonkan oleh rakyat Indonesia.
(https://www.youtube.com/watch?v=nhagiHd21IY diakes pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 20.00 WIB).

Perbedaan sudut pandang ini mendasari peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut. Dari peristiwa tertutupnya sidang, terdapat

beberapa kejadian yang cukup mencuri perhatian publik. Yaitu penonaktifan Akbar Faisal yang notabene anggota MKD Fraksi Nasdem dari persidangan tertutup secara tiba-tiba. Ia dituding merekam jalannya sidang dan membocorkannya ke Metro TV. Hal ini juga yang berkaitan dengan laporan kuasa hukum Setya Novanto. Melalui beritanya, Metro TV membela Akbar Faisal.

Berita tentang pemberhentian Akbar Faisal dari anggota MKD dikemas dari reaksi dari partai Nasdem itu sendiri. Pada 16 Desember 2015 lalu Wakil Ketua fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago saat diwawancara Metro TV *Breaking news* dengan *headline* "MKD Singkirkan Akbar Faisal" Melihat situasi politik di MKD Irma menyatakan akan tetap melawan apa yang dilakukan Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR, karena ini merupakan sikap yang tidak etis. Menurutnya Fahri Hamzah telah menyalah gunakan wewenang sebagai pimpinan, karena sebelumnya Akbar Faisal sudah mengadu ke tiga orang anggota MKD dari fraksi Golkar ke pimpinan dan tidak di publis. Menurutnya ini merupakan suatu kezhaliman yang dilakukan Fahri Hamzah sebagai pimpinan Dewan".

(https://www.youtube.com/watch?v=RgeaFj0bd-8 diakses pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 20.00 WIB).

Dari berita ini juga terkesan Metro TV dpergunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan partai Nasdem. Menginagat Metro TV merupakan anak perusahaan Media Indonesia kepunyaan Ketua Umum

partai Nasdem yaitu Surya Paloh. Sedangkan TV One yang merupakan anak perusahaan Viva Group kepunyaan Ketua Umum partai Golkar Abu Rizal Bakrie mempunyai kecendrungan membela Setya Novanto sebagai salah satu pentolan partai Golkar. Sebagai contoh, dalam berita tentang pengunduran diri Setya Novanto dikala sidang hanya tinggal menunggu ketuk palu, TV One justru memberitakan pembelaan Setya Novanto. Padahal atas peristiwa ini sedang ramai-ramaimya di tengah masyarakat.

TV One menurunkan liputan dengan narasumber Razman Arif Nasution, kuasa hukum Setya Novanto. Melalui telewicara saat di wawancara siaran langsung TV One *Breaking News,* ia menyatakan bahwa Setya Novanto tidak bersalah, pengunduran diri tersebut merupakan sebagai moral saja dan bukan karena bersalah.

> "Razman Arif Nasution membenarkan Novanto mengundurkan diri, saya berharap Setya Novanto tetap tegar dan kita tetap akan bela sampai dimana beliau membuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Ini hanya masalah moral saja, bukan karena terbukti bersalah".
> (https://www.youtube.com/watch?v=5zniqc6oM20 diakses pada tanggal 26 desember 2015 pukul 22.00WIB).

Sebelumnya peneliti mencari referensi-referensi penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada media yang sama, yaitu Metro TV dan TV One.. Penelitian sebelumnya yang ditulis Ridho Miqdar didapat dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Metro TV Mengenai Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kasus UU Pilkada

Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pengemasan berita Metro TV mengenai SBY dan Partai Demokrat pada kasus ini diarahkan pada *image* negative mengenai SBY dan Partai Demokrat. Sedangkan sisi positif SBY dan Partai Demokrat dihilangkan. Dengan kata lain, pengemasan berita Metro TV menyudutkan posisi SBY dan Partai Demokrat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas disahkannya Undang-undang Pilkada melalui DPRD oleh DPR.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Muhammad Akram yang berjudul Analisis *Framing* Pemberitaan Kampanye Presiden 2014 Pada TV One dan Metro TV. Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis *framing* model Robert N.Entman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa baik metro TV maupun TV One memberitakan kampanye Presiden dengan dukungan ke calon Presiden pilihan mereka. Kampanye hitam dan kampanye negatif diduga dilakukan oleh kedua capres-cawapres. Kemudian terjadinya pertarungan hasil survey antara kedua calon capres-cawapres. Metro TV cenderung berpihak pada pasangan Jokowi-JK sedangkan TV One mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Kecenderungan ini tidak dapat dipungkiri, terbukti dari setiap elemen *frame* yang ada dalam berita. Kecenderungan tersebut terjadi karena adanya pengaruh kekuatan kepemilikan media (*ownership*) yang notabene

merupakan pimpinan partai yang sedang bekoalisasi terhadap calon yang bersangkutan bersangkutan.

Namun, perbedaan penelitian ini dengan dahulu yaitu tekhnik analisis *framing* yang akan digunakan. Penelitian ini nantinya akan menggunakan tekhnik analisis *framing* model Gamson dan Modigliani, yang cara analisis tentunya berbeda dengan penelitian di atas yang menggunakan tekhnik analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki. Pada dasarnya penelitian analisis *framing* ada beberapa model yang bisa digunakan, namun peneliti memilih model Gamson dan Modligiani karena dirasa lebih efektif dan efisien dalam mengidentifikasi simbol hingga retorila pada wacana media yang dapat mempengaruhi khalayak.

Dalam model ini frame dianggap sebagai gugusan ide yang berupa wacana yang saling membangun kemudian dikemas hingga utuh menjadi konstruksi yang meyakinkan bagi khalayak. Kemudian frame tadi dapat diurai secara jelas dengan perangkat perangkat yang ada, sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui apa konstruksi dan bagaimana media mengarahkan khalayak kepada konstruksi yang mereka buat tersebut. Analisis *framing* model Gamson dan Modligiani banyak menekankan penandaan dalam bentuk simbolik, baik lewat kiasan maupun retorika yang secara tidak langsung mengarahkan perhatian khalayak (Eriyanto, 2002:329).

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penelitian akan menguraikan berita dengan perangkat-perangkat framing yang tersedia dalam model Gamson dan diharapkan mampu mengidentifikasi kecendrungan-kecendrungan dalam berita sidang MKD terkait kasus Papa Minta Saham ini. Lebih jauh, frame berita-berita ini diharapkan dapat digunakan sebagai bukti dugaan adanya kecendrungan berita dimanfaatkan oleh pemilik media untuk kepentingan pribadinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah:

Bagaimana Metro TV dan TV One mengkonstruksi Sidang MKD dalam kasus "Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Metro TV dan TV One mengkonstruksi Sidang MKD dalam kasus "Papa Minta Saham" PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan disiplin ilmu komunikasi, khususnya metode analisis *framing* yang menjelaskan bagaimana media mengkonstruksi dan membingkai suatu peristiwa menjadi berita yang disajikan dan ditampilkan kepada khalayak.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada khalayak dalam mengetahui bagaimana media mengkonstruksi suatu berita yang akan ditampilkan. Sehingga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tersebut terhadap sesuatu yang berbeda-beda.

E. Kajian Teori

1. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa

Media massa memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dengan adanya fungsi tersebut, media bukanlah entitas yang pasif, melainkan aktif, selektif, dan kritis. Hal ini karena media massa sebagai institusi memiliki kepentingan sendiri dan bahkan memiliki pemikiran dan idealisme secara independen.

Dalam media massa, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan.

Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto, 2002:22). Isi media memang didasarkan pada kejadian di dunia nyata, namun isi media menampilkan dan menonjolkan elemen tertentu; dan logika struktural media dipakai dalam penonjolan elemen tersebut. Bahkan, media tertentu cenderung membatasi dan menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, dan memberi porsi yang berbeda terhadap perspektif lain. Kemudian yang terjadi adalah penonjolan tertentu terhadap pemaknaan suatu realitas (Sudibyo, 2001:31).

Media memiliki realitas yang disebut realitas media. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 11). Louis Althusser dan Antonio Gramsci sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, tetapi memiliki keterikatan dengan realitas. Jelasnya ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dan negara, di dalam institusi media sendiri terselubung kepentingan lain; kepentingan kapitalisme modal, keberlangsungan lapangan kerja bagi karyawan dan sebagainya. Dalam posisi seperti ini media massa tidak mungkin berdiri statis, dia akan bergerak dinamis diantara pusaran kepentingan-kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan seperti ini yang menyebabkan bias berita di media massa adalah seseatu yang sulit dihindari (Sobur, 2001:30). Seperti halnya

Metro TV dan TV One, yang menggunakan untuk kepentingan politiknya karena pemilik kedua media tersebut merupakan politisi aktif.

Dalam kehidupan politik, media massa mampu menciptakan opini publik. Pemberitaan tentang politik senantiasa mengundang perhatian, tanggapan dan bahkan tindakan politik. Hal ini disebabkan oleh strategis dan besarnya kemampuan media dalam mengkonstruksi realitas politik. Peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan, hal ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan. Kehidupan politik hampir mustahil dipisahkan dari media massa, karena media massa merupakan alat yang ampuh dalam menyebarkan luaskan informasi.

Para aktor politik menginginkan publik ikut terlibat dalam pembicaraan dan tindakan politik melalui pesan politik yang disampaikannya. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini memang menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik (Nimmo dalam Hamad**,** 2004:2). Dalam proses komunikasi politik, peran media massa menjadi sangat penting. Fungsi media massa dalam komunikasi politik bisa menjadi penyampai pesan-pesan politik sekaligus menjadi pengirim pesan politik yang dibuat oleh para wartawannya kepada audiens. Jadi, media massa dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada khalayak. Sementara untuk para wartawan, media massa adalah wadah untuk memproduksi pesan-pesan politik, karena peristiwa-peristiwa politik itu memiliki nilai berita.

Media massa umumnya melakukan tiga kegitan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*). Kedua, melaksanakan strategi kemasan pesan *(framing strategies*). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku, dan keuatan-kekuatan luar lainnya. Dengan demikian, peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan tiga tindakan tersebut (Hamad, 2004:2-3).

Keikut-sertaan media dalam mengubah sistem politik tiada lain adalah melalui pembentukan opini publik atawa pendapat umum (*public opinion*), yaitu upaya membangunkan sikap dan sikap khalayak mengenai sebuah masalah politik dan/atau aktor politik. Bentuk pembicaraan politik tersebut dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang lagi-lagi di dalamnya terdapat pilihan simbol politik dan fakta politik. Karena kemampuan ini pula, media massa sering dijadikan alat propaganda dalam komunikasi politik. Bahkan karena peranannya ini, komunikasi politik sering diidentikan dengan propaganda (Hamad, 2004: 9).

Setidaknya ada dua penyebab mengapa komunikasi politik yang melibatkan media massa, dan memiliki ciri khas membentuk opini publik.

Pertama, dari segi luas jangkauan media dalam menyebarkan berbagai pesan dan pembicaraan politik berserta fungsinya masing-masing. Karena daya jangkau itulah para aktor politik memanfaatkan media untuk menyebarluaskan pembicaran-pembicaraan politik mereka, dengan harapan capaian tujuan politiknya juga bisa lebih jauh besar ketimbang yang bisa diperoleh melalui saluran komunikasi politik lainnya. Kedua, dari aspek "campur tangan media dalam menyajikan realitas politik melalui suatu proses yang kita sebut proses konstruksi realitas (*construction of reality*). Liputan politik sebetulnya liputan setiap peristiwa di media massa secara tertulis ataupun rekaman adalah konstruksi realitas: suatu upaya menyusun realitas dari satu atau sejumlah peristiwa yang semula terpenggal-penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004: 10).

Media massa melakukan melakukan proses pembelajaran tentang orientasi dan nilai-nilai dasar kepada individu dalam memahami lingkungan kulturalnya. Melalui media suatu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Menurut Sudibyo (2001:55) media bukanlah ranah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang, media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak.

Hal ini sangat jelas menunjukan bahwa media massa disini sebagai alat bantu yang ampuh dalam komunikasi politk. Karena itulah para aktor politik memanfaatkan media untuk menyebarluaskan pembicaraan-pembicaraan politik mereka, dengan harapan tercapainya tujuan politik yang mereka inginkan. Dengan menggunakan simbol-simbol politik dalam pembicaraan-pembicaraan politik para aktor politik tentu saja bisa mendapatkan keuntungan serta apa yang mereka inginkan. Proses konstruksi realitas disini menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, tak terkecuali hal yang berkaitan dengan politik. Laporan tentang peristiwa konflik dalam lembaga pemerintah DPR semisalya, itu merupan hasil konstruksi realitas oleh media massa.

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya (Sobur, 2001:88). Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi dan makna tertentu. Dalam media massa, keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk mengambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-realitas media yang akan muncul di benak khalayak (Hamad, 2004:12).

Penggunaan bahasa tentu berpengaruh terhadap konstruksi realitas, karena bahasa mengandung sebuah makna atau cerita. Melalui bahasa,

seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Dalam liputan politik media massa menggunakan makna dan simbol tertentu dengan gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam membuat berita untuk ditampilkan ke khalayak, dengan demikian penggunaan bahasa tersebut berimplikasi pada bentuk konsrtuksi realitas dan makna yang dikandungnya. Dalam hal ini, media massa merupakan alat bantu yang ampuh untuk menyampaikan pesan dan peristiwa politik yang diinginkan.

Atas dasar itulah bahwa bahasa bisa didaya-gunakan untuk kepentingan politik. Para eliti politik selalu berlomba menguasai wacana politik melalui media massa guna memperoleh dukungan massa. Kaum propagandis biasanya paling peduli dengan pengendalian opini publik melalui media massa. Karena daya jangkau yang dimilikinya, para politisi selalu berusaha mendapatkan dukungan media, sambil berharap konstruksi realitas politik yang dibuat media berpihak kepadanya (Bennet dalam Hamad, 2004:15).

2. Media dan Kekuasaan

Melalui media masyarakat mendapatkan informasi bagaimana menyikapi perbedaan pandangan, melalui media masyarakat mendapatkan pencerahan informasi bagaimana menentukan pilihan politik. Media merupakan sarana yang ampuh dalam menyebarkan luaskan informasi ke seluruh nusantara, khsusnya media televisi.

Media televisi selama ini cendrung menjadikan atau menempatkan posisi televisi sebagai alat yang ampuh untuk kekuasaan semata. Menempatkan televisi sebagai alat kekuasaan berarti menganggap medan pertelevisian adalah medan yang statis. Padahal di dalamnya terdapat interaksi kompleks antara para agen, khususnya para jurnalis televisi, pemilik modal, dan bahkan pihak keamanan sebagai representasi langsung Negara. Televisi digerakan secara dinamis, khususnya oleh para pekerja dibidang tersebut (Ishadi, 2014:30).

Kepentingan kepemilikan modal dalam media sudah menjadi rahasia umum dalam media yang akan mempengaruhi media tersebut dalam menyajikan berita. Berita yang dimuat oleh media mempunyai kepentingan di dalamnya. Berita yang berkaitan dengan ideologi dari suatu media, maka berita tersebut akan disajikan secara terus menerus oleh media. Pemilik modal atau pemilik media menggunakan media untuk kepentingan ekonomi dan politik. Pemilik media secara aktif melakukan intervensi demi jaminan liputan yang menguntungkan. Dalam dunia politik menggunakan media massa khususnya media televisi adalah alat yang ampuh untuk mencapai visi kepemilikan media dari beragam kepentingan maupun kepentingan yang terjadi dalam politik. Dalam hal ini, media tidak hanya digunakan pemilik untuk kepentingan pribadi, tapi juga bagi para elit politik demi untuk mendapatkan keuntungan. (Sumber: Jurnal Setiawan, Tekanan Konglomerat Media Terhadap Otonomi Individual para praktisi, Hal 50-51).

Televisi menjadi alat untuk menjatuhkan lawan atau pesaing politik. Rivalitas politik pun hadir kemudian hadir dalam ruang redaksi. Di sini para pemilik media tidak hanya berupaya mendongkrak pencitraan dirinya, tapi juga berupaya menurunkan popularitas rival politiknya. Di sini ada taktik meninggikan setinggi-tinggi dirinya dan menenggelamkan sedalam-dalam lawan politiknya (Riyanto, dan Rahayu, 2014: 141-142).

Contohnya dapat kita amati peristiwa sidang MKD kasus papa minta saham terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Metro TV dan TV One. Peristiwa tersebut menunjukan pertarungan politik, para aktor politik tersebut tidak sungkan untuk saling menjatuhkan lawan politiknya agar popularitas mereka meningkat. Hal tersebut dikarenakan atas dasar kedua media televisi tersebut pemiliknya merupakan politikus dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Tentunya dari kedua media tersebut mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam pembingkaian berita sidang MKD.

Kemampuan media dalam membangun konstruksi sosial jelas memberikan kekuasaan luar biasa bagi para pemilik dan pekerja media. Melalui media, orang bisa membangun suatu konstruksi tertentu dengan cara yang meyakinkan. Hal ini telah memaksa para penguasa politik untuk berbaik-bai dengan para pemilik media. Namun, disisi lain para pemilik media itu memerlukan keamanan bisnis. Di sini terjadi simbiosis

mutualisme antara penguasa dan pemilik media (Iskandar dalam Rianto dan Rahayu, 2014: 136).

Van Dijk Mendefinisikan Kekuasaan sebagai kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. Kekuasaan umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai seperti uang, status dan pengetahuan. Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, kekuasaan juga berbentuk persuasif: tindakan sesorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap dan pengetahuan (Eriyanto. 2002: 272).

Dengan adanya media masyarakat bisa belajar bagaimana bersikap yang bijak dalam menghadapi keragaman. Namun sayang, kini media tidak lagi memiliki idealisme yang diharapkan masyarakat, media dikendalikan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan pragmatis. Dampaknya isi media tidak mencerminkan kepentingan publik. Ruang publik menjadi tergadaikan oleh kepentingan pemiliknya.

3. Berita Politik

Obyek yang diteliti pada penelitian ini yaitu pemberitaan sidang MKD kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan Nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dimuat dalam Metro TV dan TV One. Peristiwa ini secara langsung bentuk

pertarungan politik dalam MKD saat mengadili Setya Novanto, karena Novanto dinilai melanggar kode etik DPR. Berita politik merupakan berita utama media karena relevasi dan implikasinya mencakup masyrakat luas. Berita media pada dasarnya memiliki dimensi politik, karena media adalah institusi politik (Simarmata, 2014:16). Strategi untuk mengkaji pers sebagai intitusi politik adalah berusaha memahami kapan organisasi media menjadi aktor dependen dalam proses politik dan kapan media menggunakan pengaruhnya terhadap aktor dan fenomena politik secara independen (Simarmata, 2014:17).

Relasi media dan politik bersifat saling mempengaruhi. Artinya relasi media dan politik selalu bersifat kooperatif, tapi juga dapat bertentangan atau berbeda pandangan. Namun yang paling penting dari hubungan tersebut adalah posisi media yang melihat politik dari sisisebagai sumber berita, sementara disisi lain sebagai proses yang harus dikritiknya. Artinya, apakah media dapat menjalankan fungsi kritiknya atau malah menjadi alat propaganda elit politik saja (Simarmata, 2014:5).

Topik berita politik sangat luas mulai dari kebijakan, sikap politik pejabat negara (*action or inaction*), isu publik, konflik kepentingan, lembaga/institusi politik, aktor politik, hingga sistem politik secara keseluruhan (Simarmata, 2014:19). Setidaknya terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media khususnya oleh para komunikator massa tatkala melakukan konstruksi realitas termasuk realitas politik yang berujung pada sebuah citra politik : pemilihan simbol (fungsi

bahasa);pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi *framin*g) dan ketersediaan memberi tempat (*agenda setting*) (Hamad 2004 : 16).

Pemberitaan politik setidaknya mempunyai dua kecenderungan : *pertama* media cenderung meliput sisi konflik dari politik daripada sisi kerja sama dengan dasar nilai berita; *kedua*, media sangat tergantung pada sumber elit politik karena keahlian dan jabatan mereka dalam struktur politik. Akibatnya ada kemungkinan media menjadi alat politik para elit (Simarmata, 2014:26).

Mengenai faktor yang yang mempengaruhi pemberitaan salah satunya adalah faktor internal, yaitu kepemilikan modal. Metro TV dan TV One berada dalam naungan perusahaan media milik politikus aktif di Indonesia, yaitu Surya Paloh dan Aburizal Bakrie. Deveroux berpendapat bahwa kepemilikan media berpengaruh pada isi berita yang diproduksi oleh media tersebut. Penjelasannya antara lain sebagai berikut:

a) Adanya fakta bahwa para pemilik media massa menjadi konglomerattransnasional yang mempunyai wewenang mengontrol di bidang media dan non media.
b) Terjadinya pergantian *audience* sebagai konsumen dari media, bukan sebagai warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan informasi dari media itu sendiri atas apa yang sedang terjadi di sekitarnya.

c) Timbulnya kekuasaan yang cenderung mendominasi di bidang ekonomi dan politik dalam kaitannya dengan kepemilikan media.

d) Adanya intervensi atau campur tangan dari pemilik modal dan pemilik media terhadap pemberitaan di media massa miliknya, khususnya pemberitaan mengenai dirinya atau media yang ia miliki.

e) Adanya deviasi atau penyimpangan dalam berita, sehingga para awak media tidak lagi begitu mempedulikan kode etik dalam produksi dan proses peliputan berita.

f) Adanya ideologi yang dominan dalam media massa, sehingga mempengaruhi produksi berita (Devereux, 2003 : 54).

4. Produksi Berita Dalam Media

Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak.

Berita memiliki batasan-batasan sehingga ia layak disebut berita. Beberapa penulis merumuskan batasan tersebut sebagai berikut:

a. M. Lyle Spencer, dalam buku *News Writing* menyebutkan, berita merupakan kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.

b. Williard C. Bleyer, dalam buku *Newspaper Writing and Editing* mengemukakan, berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena dia dapat menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut.

c. William S. Maulsby dalam buku *Getting in News menulis*, berita dapat didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.

d. Eric C. Hepwood menulis, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum.

(Assegaff, 1991:23).

Menurut Fishman dalam Eriyanto (2002: 116-117) ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selectivity of news*). Intinya, proses produksi berita itu adalah proses seleksi. Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang peristiwa yang bisa diberitakan dan mana yang tidak. Setelah itu berita masuk ke tangan redaktur, akan diseselksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada ralitas yang benar-benar riil

yang ada di luar diri wartawan. Realitas yang riil itu lah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. Pendekatan kedua dalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). dalam perspektif ini, peristiwa itu buka diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyak menentukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan. Berita dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan karena ada realitas objektif yang berada diluar, melainkan karena orang akan mengorganisasikan dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang koheren dan beraturan serta mempunyai makna. Proses terbentuknya berita merupakan sebuah informasi yang diambil wartawan, dan kemudian diambil oleh redaktur, dan seterusnya. Sehingga informasi tersebut pada dasarnya membentuk konstruksi dan realitas sehingga menjadi sebuah berita.

Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Peristiwa adalah suatu fenomena, ia hanya ada dalam organisasi pikiran kita. Ketika memutuskan mana yang dianggap berita, wartawan memakai skema interpretasi. Dalam tingkatan paling awal, ia menentukan mana yang dianggap sebagai peristiwa *(event*) dan mana yang bukan peristiwa (*Non-Event*). Peristiwa

dalam lapangan jurnalistik bukanlah realitas yang nyata, ia adalah fenomena interpretasi yang melibatkan aktivitas yang kompleks. Karena peristiwa bagian di mana seseorang mendefinisikan sesuatu dan menyatakan bahwa ini adalah kenyataan (Eriyanto, 2002: 118).

Sebelum menjadi berita, sebuah peristiwa atau informasi diliput oleh wartawan sebagai ujung tombak media. Proses kerja wartawan berdasarkan pada prosedur-prosedur yang mengatur bagaimana sebuah peristiwa kemudian menjadi komoditas yang layak dipublikasikan. Berita merupakan hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Dari jutaan peristiwa yang terjadi di dunia kemudian disortir dengan batasan yang disediakan dan dihitung agar layak diturunkan sebagai sebuah berita (Eriyanto, 2002:119).

Dalam proses membuat berita, setidaknya wartawan melalui dua proses penting; *pertama*, wartawan berusaha untuk melaporkan seakurat mungkin tentang kebenaran atau realitas dari suatu peristiwa lewat observasi langsung, maupun dengan menggunakan beberapa sumber relevan seperti otoritas terkait, ahli yang tepat dan reliable, serta sumber fisik yang relevan;*kedua,*wartawan berusaha menulis cerita yang menarik, tepat waktu dan jelas. Dalam proses ini wartawan sering menggunakan kutipan, anekdot,contoh, dan isu kemanusiaan untuk menghidupkan beritanya (Mencher dalam Simarmata, 2014:20).

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh sebuah media sebelum meproduksi berita adalah sebagai berikut :

a. Briefing Redaksional

Pada proses pembuatan berita ada ruang yang akan menyeleksi atau menentukan apakah sebuah peristiwa dapat dijadikan sebuah berita untuk disiarkan ke publik yaitu disebut sebagai ruang redaksi (*newsroom*). Apakah suatu peristiwa memiliki nilai berita sesungguhnya merupakan tahap awal dari proses kerja redaksional. Dalam ruang redaksi, sebelum seorang reporter mencari dan meliput berita ke lapangan, terlebih dulu dilakukan rapat redaksi atau briefing di pagi hari antara pemimpin redaksi dengan reporter yang mencari berita ke lapangan. Dalam proses rapat tersebut ada arahan yang diberi oleh pemimpin redaksi untuk mencari dan memilih berita yang sesuai dengan kepentingan dan agenda dari media tersebut. Pemimpin redaksi merupakan orang yang bertanggungjawab atas operasi keredaksian secara keseluruhan. Tempat dimana kegiatan keredaksian ini berlangsung disebut dapur redaksi. Dapur redaksi dipimpin dan dikelola langsung oleh redaktur pelaksana, sedangkan pemimpin redaksi hanya mengawasi dan mengarahkan atau melakukan supervisi atas

operasionalisasi keredaksian (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2009: 73-74).

b. Prosedur Pemilihan Berita

Setelah proses briefing dilakukan, kemudian reporter atau tim pencari berita ditugaskan terjun langsung ke lapangan untuk mencari berita. Tim pencari berita atau reporter mencari dan mengumpulkan berita yang sesuai dengan arahan sang redaktur. Dalam proses mencari berita, biasanya pencari berita menyusun suatu perencanaan semacam *check list* (daftar periksa) atau *planning sheet*yang isinya menyusun daftar sumber-sumber yang akan dihubungi yang sesuai dengan agenda media. Setelah seluruh materi berita terhimpun, kemudian mentahan materi berita dikumpulkan di ruang redaksi atau meja redaktur. Kemudian setelah itu, dilakukan penilaian untuk menilai layak atau tidaknya sebuah berita untuk dimuat. Untuk menilai kelayakan sebuah berita adalah seberapa besar unsur-unsur nilai berita yang terdapat dalam beritanya. Semakin banyak unsur nilai berita yang terdapat di dalamnya, semakin tinggi nilai kelayakan berita tersebut.

Pada tahap akhir yaitu dilakukan penyuntingan berita atau editing. Dalam tahap *editing* ini, dilakukan proses pemilihan sisi mana yang perlu diambil atau ditonjolkan ke publik dan sisi mana yang dibuang. Dalam proses ini dilakukan juga pemerkayaan berita yang sesuai dengan agenda

media. Proses ini semua merupakan proses pengemasan atau pembingkaian sebuah berita yang sesuai dengan kepentingan dan agenda media yang dibuat di ruang redaksi (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2009: 73-74).

Nilai berita yang dimaksud di atas adalah unsur-unsur yang membuat sebuah peristiwa berbeda dengan peristiwa lainnya sehingga layak diberitakan kepada khalayak. Sebuah peristiwa atau kejadian harus memiliki unsur penting dan menarik. Setiap orang mempunyai persepsi berbeda mengenai hal yang penting dan menarik baginya. Namun demikian, nilai berita (*News value/news worthy*) yang terkandung dalam berita akan menjadi *magnet* yang menarik pembaca untuk mengkonsumsi berita tersebut (Siregar, 1998: 27). Nilai berita menjadi semacam acuan dalam prosedur produksi berita oleh wartawan dan menjadi penentu nilai jurnalistik pada suatu peristiwa. Hal ini dilakukan agar berita yang dihasilkan lebih dekat dengan konstruksi sosial yang sudah berlaku di dalam masyarakat atau khalayak sehingga berita diterima sebagai berita yang menarik.

Kejadian yang dianggap memiliki nilai berita atau layak berita secara umum mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

a. *Significant* (penting)

Suatu kejadian atau peristiwa yang apabila diberitakan akan mempengaruhi pembacanya atau memiliki makna penting bagi pembacanya.

b. *Timeliness* (waktu)

Peristiwa atau kejadian yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan waktu (peristiwa baru terjadi atau baru ditemukan).

c. *Magnitude* (besar)

Kejadian atau peristiwa yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi khalayak atau kejadian yang menyangkut dengan angka apabila dijumlahkan akan menarik bagi pembaca.

d. *Proximity* (kedekatan)

Kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan dengan faktor keterkenalan.

e. *Human interest* (manusiawi)

Kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur manusiawi. Kejadian yang dapat memberikan sentuhan perasaan para pembaca. Semakin peristiwa tersebut memiliki banyak nilai berita, maka semakin kuat disebut sebagai berita dan memiliki kemungkinan peristiwa tersebut di tempatkan dalam headline. Nilai berita tidak saja memiliki tolak ukur

wartawan dalam bekerja, tetapi sudah menjadi ideologi wartawan dalam meliput berita (Siregar, 1998: 27-28).

Selain nilai berita, hal prinsip lain dalam produksi berita adalah kateg ori berita untuk menggambarkan peristiwa yang akan digunakan sebagai berita. Menurut Tuchman secara umum wartawan memakai lima kategori berita (Eriyanto, 2002: 126-130).

a. *Hard news*

Berita mengenai peristiwa yang terjadi saat itu. Kategori berita ini sangat dibatasi oleh waktu dan aktualitas, semakin cepat diberitakan maka semakin baik. Peristiwa yang masuk dalam kategori *hard news* ini bisa peristiwa direncanakan dan bisa juga peristiwa yang tidak direncakan.

b. *Soft news*

Ketagori berita ini berhubungan dengan kisah manusiawi (*human interest*). Sebuah peristiwa kisah manusia yang menarik untuk di tulis menjadi sebuah berita yang mengandung nilai-nilai manusiawi.

c. *Spot news*

Spot news merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa direncanakan dan diprediksikan, misalnya sebuah kecelakaan, bencana alam, dan pembunuhan.

d. *Developing news*

Peristiwa yang akan di beritakan adalah bagian dari rangkaian berita yang akan diteruskan keesokan atau dalam berita selanjutnya. Misalnya peristiwa kecelakaan pesawat, dalam berita pertama lokasi kecelakaan, dilanjutkan dengan berita mengenai nama korban dan sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan seterusnya.

e. Continuing news

Dalam *continuing news* peristiwa-peristiwa yang bisa diprediksikan dan direncanakan. Perdebatan memang terjadi antara satu pendapat dengan pendapat lain, tetapi tetap masuk dalam tema dan bidang yang sama. Proses dan peristiwa tiap hari berlangsung secara kompleks, tetapi tetap berada dalam wilayah pembahasan yang sama.

Dalam produksi berita media dan wartawan juga berpatokan pada ideologi profesional/objektif. Kalau nilai berita berhubungan dengan prosedur apa yang bisa disajikan oleh media kepada khalayak maka standar profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan kepada khalayak bahwa apa yang disajikan adalah suatu kebenaran. Menurut Shoemaker dan Reese dalam Eriyanto (2002), objektivitas merupakan ideologi bagi jurnalis bahwa pekerjaan wartawan dalam menyampaikan suatu peristiwa adalah suatu kebenaran apa yang sebenarnya terjadi dan bukan opini wartawan.

Selanjutnya Eriyanto menjelaskan objektivitas dalam produksi berita secara umum digambarkan secara umum tidak mencampuradukan antara fakta dengan opini. Prosedur yang diakukan adalah dengan melakukan reportase pengamatan, wawancara dengan sumber yang diperkuat dengan kutipan, foto, label, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa wartawan tidak memihak.

Melihat proses produksi berita ada dua pendekatan, yaitu pendekatan seleksi berita (*selectivity of news*) dan Pendekatan pembentukan berita (*creation of news*), penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan seleksi berita (*selectivity of news*)

   Yaitu pendekatan yang seringkali digunakan oleh komunikator yang akan memilih bagian mana dari berita yang penting dan mana yang tidak penting untuk ditampilkan kedalam sebuah berita. Pendekatan tersebut seolah-olah menyatakan bahwa terdapat realitas sebenarnya atau riil yang memang sengaja diseleksi oleh wartawan untuk disajikan ke dalam sebuah berita.

b. Pendekatan pembentukan berita (*creation of news*)

   Yaitu pendekatan yang melihat peristiwa bukanlah sesuatu yang diseleksi melainkan dibentuk oleh wartawan. Wartawan pula yang membentuk peristiwa, sehingga mana yang layak disebut berita dan mana yang tidak layak menjadi berita. Wartawan turut berperan aktif dalam membentuk suatu realita

yang kemudian dikemas sedemikian rupa dalam bentuk media (Fishman dalam McQuail 2011 :163).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberitaan

Dalam konteks penelitian ini, berita merupakan hasil dari proses konstruksi yang terjadi di dalam sebuah institusi media bernama media. Terdapat berbagai kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi isi media saat proses produksi berita berlangsung. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D.Reese dalam Sudibyo menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi berita tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor individu, Yang mungkin mempengaruhi isi media diantaranya latar belakang personal (tanah kelahiran, jenis kelamin, usia, agama, pendidikan formal maupun informal), pengalaman organisasi atau pekerjaan, nilai yang dianut, bahkan sampai kecendrungan orientasi politik tertentu. Termasuk juga dalam faktor ini adalah perilaku pemahaman terhadap nilai kepercayaan, serta orientasi profesional jurnalis tersebut. terkait banyaknya latar belakang yang dibawa oleh masing-masing personal, wartawan maupun pengelola media. Maka hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap proses peliputan dan pengemasan berita, dengan kata lain wartawan punya kuasa untuk menentukan berita mana yang akan ditampilkan, dan mana yang lebih ditonjokan, maupun sebaliknya.

b. Faktor rutinitas Media, berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita yang meliputi bagaimana berita dibentuk, melalui proses apa serta melalui tangan siapa saja berita diproduksi sebelum sampai pada proses pencetakan. Segala proses seleksi berita, terjadi karena rutinitas kerja keredaksionalan yang dipandang sebagai suatu bentuk rutinitas organisasi media. Disini pula seorang redaktur memegang kendali pemberitaan, karena redaktur memiliki otoritas penuh untuk memutuskan peristiwa mana yang layak diangkat dalam sebuah berita dan mana yang tidak layak.

c. Faktor organisasi, yang berhubungan dengan struktur organisasi pada media. Wartawan dan pengelola media bukanlah penguasa tunggal yang menentukan isi media secara keseluruhan, karena selain mereka ada bagian redaksi, pemasaran, iklan, sirkulasi, umum dan seterusnya. Setiap dari media ini punya kepentingan dan strategi untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu juga, mempunyai filosofi keorganisasian sendiri. Perbedaan dalam hal-hal yang dianut antar divisi tertentu berpengaruh pada keputusan akhir terhadap berita yang akan disajikan.

d. Faktor ekstramedia atau faktor lingkungan di luar media yang menyangkut tiga faktor utama, yaitu:

1. Narasumber berita yang mempunyai kepentingan tertentu, yang lewat kampanye *public relations* dan *pressure group* dapat mempengaruhi proses konstruksi realitas di dalam media.
2. *Revenue resouces* atau sumber penghasilan media.
3. Lembaga lain diluar media, seperti kalangan pemerintah, lingkungan bisnis, ekonomi, maupun teknologi.

e. Faktor ideologi kerangka berfikir tertentu, dimiliki oleh institusi media maupun orang-orang di dalamnya dan digunakan sebagai cara dalam melihat, menghadapi, dan menafsirkan realitas tertentu. Ideologi ini menyoroti pihak yang berkuasa dimasyarakat, serta bagaimana kekuatan itu berperan dalam menentukan agenda media (Sudibyo, 2001:7-13).

6. Analisis Framing

Untuk mengetahui *framing* media dalam mengkonstruksi dan memberitakan suatu realitas dapat menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi oleh media. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002: 10).

Analisi *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana., khususnya untuk menganalisis teks media. *Frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang

mengorganisir pandangan politik, kebijakan, wacana, serta realitas. Kemudian konsep ini yang mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Beterseon dan Goffman dalam Sudibyo, 2001: 220).

Salah satu yang menjadi prinsip analisis *framing* adalah bahwa wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, *metric objektifitas,* serta batasan-batasan tertentu dalam mengelolah dan menyuguhkan berita. Dalam merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristal skemata interpretasi (*schemata of interpretation*). Dengan skemata ini pula wartawan cendrung membatasi atau menyeleksi sumber berita, serta memberi porsi yang berbeda terhadap tafsir atau perspektif yang muncul dalam wacana media (Sobur, 2012: 166).

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2002:261).

Framing seperti yang dikatakan Todd Gitlin atau Edelman, adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca (Eriyanto, 2002:68). Mereka menggunakan framing untuk melihat kecendrungan

media mengkonstruksi dan membingkai pesan. Sehingga jelas berdasarkan Gitlin dalam Eriyanto, dengan framing jurnalis memproses berbagai informasi yang tersedia dengan jalan mengemaskan sedemikian rupa dalam katagori kognitif tertentu dan disamping pada khalayak (Eriyanto, 2002:69).

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya (Sudibyo dalam Kriyantono, 2006:255).

Menurut Eriyanto (2002: 167-168) ada tiga ciri utama dari *framing*. Pertama, menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lain. Kedua, menampilkan sisi tertentu dan melupakan isi lainnya. Ketiga, menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lainnya.

1. Menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek lainnya. Pada point ini dalam penulisan berita sering disebut sebagai focus berita. Berita secara sadar atau tidak diarahkan padaaspek tertentu oleh wartawan. Dalam pemahaman ini ada aspek lain yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
2. Menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi lainnya. Pada point ini, sebuah berita lebih ditampilkan dari sisi tertentu. Dengan

menampilkan sisi tertentu dalam berita sehingga ada sisi lain yang dilupakan atau tidak mendapatkan liputan dalam berita.

3. Menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor lainnya. Sebuah berita ditampilkan pada satu actor atau pihak tertentu saja. Sedangkan aktor yang lainnya tidak ditampilkan. Hal ini yang menyebabkan efek yang segera terlihat merupakan focus pada satu pihak atau aktor tertentu menyebabkan aktor lain yang mungkin relevan dan penting dalam pemberitaan menjadi tersembunyi.

Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai juga untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pusat perhatian dari analisis *framing* yaitu pembentukan pesan dari teks (Eriyanto, 2002:11).

Analisis *framing* menggunakan paradigma konstruksionis. Paradigma ini pertama kali diperkenalkan oleh sisiolog interpretative Peter L Berger dan Thomas Luchman. Paradigma ini memandang bahwa realitas itu tidak terjadi secara ilmiah melainkan dibentuk oleh manusia. Dalam konteks media, wartawanlah yang membentuk realitas. Suatu peristiwa dibuat menjadi berita, mana berita yang akan ditampilkan dan mana yang tidak ditampilkan oleh wartawan. Paradigm ini memandang bahwa realitas itu tidak ada yang objektif, karena realitas tercipta melalui proses konstruksi dan pandanga tertentu. Dengan pemahaman ini artinya realitas itu bersifat plural. Setiap orang mempunyai penafsiran yang berbeda-beda

atas suatu peristiwa. Sehingga realitas yang sama bias jadi menghasilkan berita yang berbeda (Eriyanto, 2002: 15-16).

Paradigma konstruksionis ini mempunyai pandangan dan penilaian tersendiri dalam memandang media, wartawan dan berita. Pardigma ini memandang media sebagai agen kosntruksi, media bukanlah saluran yang bebas melainkan sebagai subjek yang berperan penting dalam mengkonstruksi realitas. Berbeda dengan pandangan positivistik, yang memandang realitas itu objektif. Media hanya alat atau saluran untuk menyampaikan pesan. Paradigma positivis lebih cendrung memandang media sebagai sarana yang netral.

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis. Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan proses bagaimana sesorang membuat gambaran tentang realitas. Makna adalah bukan suatu yang absolut, makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan sesorang dalam suatu pesan. Kedua, pendekatan konstruksionis ini memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan konstruksionis memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator dan dalam sisi ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Pesan dipandang bukan sebagai *mirror of reality* yang menampilkan fakta apa adanya. Dalam menyampaikan pesan, seseorang menyusun citra tertenu atau merangkai ucapan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas (Eriyanto, 2002: 47-48).

Dalam ranah studi ilmu komunikasi,analisis *framing* mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipiner untuk menganalisis fenomena atau aktifitas komunikasi. Konsep tentang *framing* atau *frame* bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi pinjaman dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam praktiknya, analisis *framing* juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya (Sudibyo dalam Sobur, 2012:162).

Terdapat beberapa definisi *framing* menurut para ahli ilmu komunikasi, diantaranya model Robert N. Entman, William A. Gamson, Todd Gitlin, David E. Snow dan Robert Benford, Amy Binder, dan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut pandangan Robert N. Entman *framing* adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi yang lain.

Menurut Gamson *framing* merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan

itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan yang ia terima.

Pandangan Todd Gitlin *framing* merupakan strategi bagaimana realita suatu dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.

Menurut David E. Snow dan Robert Benford framing adalah pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.

Menurut pandangan Amy Binder *framing* adalah skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membentuk individu untuk mengerti makna peristiwa.

Terakhir Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki bahwa *framing* merupakan strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita (Eriyanto, 2002: 77-79).

Semua definisi framing di atas merupakan pandangan dari ahli komunikasi yang menjelaskan sebuah peristiwa yang kemudian di konstruksi oleh media sehingga menjadi sebuah realitas sosial. Tetapi hal yang membedakan yaitu cara menyajikannya. Karena masing-masing ahli komunikasi di atas mempunyai cara atau tekhnik analisis masing-masing untuk mencari tahu bagaimana media membingkai peristiwa untuk mudah dipahami oleh khalayak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif mengenai pembingkaian berita mengenai kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penelitian ini melalui analisis *framing* yang akan menggambarkan konstruksi realitas yang dibangun oleh media, bagaimana sebuah realitas dibingkai dan disajikan oleh media. Posisi peneiti dalam penelitian deskriptif ini adalah sebagai pengamat.

Penelitian deskriptif kualitatif memiliki ciri tersendiri yaitu data yang dikumpulkan merupakan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran

penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo (Moleong, 2001: 6).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tekhnik analisis *framing*. Analisis *framing* merupakan metode analisis teks yang termasuk dalam penelitian konstruksionis. Paradigma konstruksionis memiliki pandangan bahwa realitas sosial bukanlah sebuah realitas yang apa adanya, namun hasil dari konstruksi yang dibuat oleh wartawan dalam media. Oleh karena itu, analisis *framing* bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas yang dikonstruksi oleh media dan bagaimana konstruksi realitas tersebut dibentuk. Analisis *framing* adalah analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2002:3). Dengan menggunakan Analisis *framing,* peneliti akan melihat perbedaan sudut pandang Metro TV dan TV One dalam membingkai peristiwa sidang MKD pada kasus papa minta saham. Sehingga akan menarik bila dibedah dengan menggunakan kajian analisis *framing.*

Penelitian ini menggunakan tehknik analisis *framing* model Gamson dan Modigliani, yang merupakan salah satu model yang paling populer untuk menganalisis frame berita yang dikonstruksi media. Alasannya, dengan menggunakan model *framing* Gamson dan Modigliani peneliti dapat menguraikan makna, simbol, maupun retorika pada wacana pemberitaan sidang MKD terkait kasus papa minta saham yang dibingkai oleh media Metro TV dan TV One dengan lebih efektif dan efisien.

Model ini lebih fokus pada penandaan simbolik melalui kiasan atau retorika yang mengarahkan perhatian khalayak. Dengan menggunakan perangkat framing dan perangkat penalaran memudahkan peneliti mengidentifikasi konstruksi yang dibangun oleh kedua media tersebut.

Metode penelitian Gamsom memiliki dua perangkat framing dalam teks berita untuk menerjemahkan ide sentral dalam berita. Pertama, *framing device* (perangkat *framing*) yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu. Kedua, *reasoning devices* (perangkat penalaran) yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu, dan sebagainya. . Dasar pembenar dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau pandangan, melainkan lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tampak benar, absah, dan demikian adanya. Lewat aspek aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar. Gagasan atau bingkai tersebut agar tampak meyakinkan, teks didukung dengan perangkat framing (*framing device*) yang ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, metafora, atau ilustrasi tertentu untuk menekankan gagasan tertentu. Agar tujuan gagasan itu tampak wajar dan benar, teks berita tersebut didukung oleh perangkat

penalaran (*reasoning device*), supaya gagasan yang tersaji tampak beralasan, tidak mengada-ngada, benar, alamiah, dan memang itu yang sebenarnya (Eriyanto, 2002: 263-265).

Analisis framing model Gamson dan Modigliani termasuk paradigma konstruksionis, yang bersifat kualitatif. Konsep framing yang ditulis Gamson bersama Modigliani bahwa sebuah *frame* mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan suatu isu. Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, *frame* dipandang sebagai cara bercerita *(story line*) atau gugusan ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana (Eriyanto, 2002: 260-261).

Peristiwa yang sama namun dapat dimaknai secara berbeda, dan pada akhirnya menghasilkan berita yang berbeda pula. Masing-masing kata, kalimat, metafora, pengandaian, dan elemen-elemen lainnya saling berkaitan, dan saling mendukung pada gagasan atau kemasan tertentu. Model ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana media Metro TV dan TV One dalam membingkai (*framing*) pemberitaan tentang kasus papa minta saham PT. Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berikut ini model analisis framing yang diperkenalkan William A. Gamson dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perangkat Framing Model Gamson dan Modigliani

Framing Devices (Perangkat framing)	***Reasoning Devices*** (Perangkat Penalaran)
Methapors Perumpamaan atau pengandaian.	***Roots*** Analisis kausal atau sebab akibat.
Cathchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	***Appeals to principle*** Premis dasar, klaim-klaim moral.
Exemplaar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	***Consequences*** Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.
Depiction Pengambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Depiction ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. ***Visual Images*** Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk	

menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.	

(Eriyanto, 2002: 262).

Frame (gagasan sentral) pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa. Selain itu, frame juga mengarahkan makna isu-isu yang dibangun *framing devices* dan *reasoning devices. Framing devices* mencakup lima hal: methapors**,** *cathchphrases, exemplaar, depiction, visual images.* Kelimanya menekankan aspek bagaimana melihat gagasan utama yang ingin ditampilkan. *Framing devices* digunakan agar bingkai suatu teks nampak meyakinkan. Pertama, *methapors* dipahami sebagai cara memindah makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi, atau kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti, ibarat, bak, sebagai umpama, laksana.

Kedua, *catchphrases* dapat berupa frase yang menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana yang merujuk pada pemikiran tertentu. Dalam teks berita, *catchphrases* muncul dalam bentuk jargon, slogan, atau

semboyan. Selanjutnya *exemplar* adalah mengaitkan bingkaidengan contoh, uraian, (bisa teori perbandingan) yang memperjelas bingkai.

Ketiga, *exemplaar* adalah cara mengemas atau menguraikan sebuah fakta tertentu secara mendalam, supaya memiliki makna yang lebih untuk dijadikan rujukan. Dalam *exemplaar* posisinya sebagai pelengkap dalam kesatuan wacana atau bingkai pada sebuah teks atau dialoh mengenai isu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh pembenaran isu sosial yang diangkat, bisa berupa contoh, uraian, teori, dan perbandingan yang bisa memperjelas bingkai.

Keempat, *depiction* adalah penggambaran fakta dengan memaknai kata, istilah, atau kalimat konotatif agar khalayak terarah pada citra tertentu. Asumsinya, pemakaian kata khusus diniatkan untuk membangkitakan prasangka serta menyesatkan pikiran. *Depictions* dapat berbentuk stigmatisasi, eufimisme, serta akronimasasi.

Terakhir, *visual image* berupa gambar grafik, diagram, tabel, dan kartun dan sejenisnya juga citra yang digunakan untuk mengekspresikan kesan menekan pesan yang ingin disampaikan. Menurut Stuart Allan, visual lebih berdaya memindah realitas dalam wacana dibanding teks. Misalnya perhatian, penegasan, atau penolakan, terhadap isu tertentu. Sifatnya natural, sangat mewakili realitas atau isu tertentu erat dengan ideologi pesan terhadap khalayak (Sobur, 2002:115-117).

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berita mengenai kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di media Metro TV dan TV One selama bulan Desember 2015.

Tabel 1.2

Obyek Penelitian

Media	Tanggal	Berita
Metro TV	7/12/2015	1. Mengadili Etika Setya Novanto.
	16/12/2015	2. MKD Singkirkan Akbar Faisal.
	16/12/2015	3. Setya Novanto Mundur Hindari Sanksi
TV One	7/12/2015	1. Sidang Harus Tertutup Jika Mengacu Pada UU.
	16/12/2015	2. Akbar Faisal Dinonaktifkan dari MKD
	18/12/2015	3. Novanto Mundur Hindari Sanksi

Berikut *screenshot* berita kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Metro TV dan TV One:

Metro TV:

Gambar 1.1 Metro TV

Ruhut Sitompul Anggota DPR RI menyayangkan sikap MKD terhadap keputusan sidang yang dilakukan secara tertutup, pasalnya sidang sebelumnya dilakukan terbuka.
(https://www.youtube.com/watch?v=eRsN6NaDsYc diakses pada 25

Desember 2015 pada pukul 20.00 WIB).

Gambar 1.2 Metro TV

Pemberhentian Akbar Faisal dari anggota MKD ditanggapi negatif dari politisi Nasdem Irma Surya Chaniago
(https://www.youtube.com/watch?v=RgeaFj0bd-8 diakses pada 25

Desember 2015 pada pukul 20.00 WIB).

Gambar 1.3 Metro TV

Pengunduran Setya Novanto penuh dengan intrik politik, dan dinilai untuk menghindari sanksi dari MKD.
(https://www.youtube.com/watch?v=e6RXndrzcvY diakses pada 25

Desember 2015 pada pukul 20.00 WIB).

TV One:

Gambar 1.4 TV One

Jika mengkaji pada undang-undang sidang MKD harus dilakukan secara tertutup.
(https://www.youtube.com/watch?v=nhagiHd21IY diakses pada 25

Desember 2015 pada pukul 20.00 WIB).

Gambar 1.5 TV One

Melakukan pelanggaran, Akbar Faizal dinonaktifkan dari keanggotaan MKD.
(https://www.youtube.com/watch?v=4DOQNK8N4J8 diakses pada 25

Desember 2015 pada pukul 20.00 WIB).

GAmbar 1.6 TV One

Pengunduran diri Setya Novanto dari ketu DPR bahwa sebagai bentuk moral saja, bukan karena bersalah.
(https://www.youtube.com/watch?v=5zniqc6oM20 diakses pada 25 Desember 2015 pada pukul 20.00 WIB).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada serta catatan-catatan yang berhubungan dengan analisis. Data yang diperoleh dari metode tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sendiri diperoleh dari kumpulan tayangan Metro TV dan TV One mengenai kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama periode Desember 2015.

b. Data Sekunder

Selain data-data primer, peneliti dalam penelitian ini juga memerlukan data sekunder. Data- data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang data-data primer. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data sekunder dan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, antara lain mengumpulkan data-data yang terdapat pada buku-buku, jurnal, website dan berbagai sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan penulisan skripsi ini. Analisis data pada penelitian ini menggunakan konsep framing yang menekan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, dan konsep memaknai tentang pemberitaan sidang MKD kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Metro TV dan TV One. Analisis framing mampu untuk mencari tahu bagaimana kedua media tersebut melakukan proses pembingkaian berita kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pasalnya, analisis framing merupakan sebuah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan wartawan dalam menyeleksi isu dan menuliskan berita untuk ditampilkan ke publik.

Analisis data dalam penelitian ini sudah dijelaskan diatas bahwa menggunakan analisis framing dengan model Gamson dan Modigliani. Untuk itu, ada dua struktur atau level yang dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis. Pertama level teks, yaitu menganalisa *transkrip* (salinan) yang ada pada video berita pada media Metro TV dan TV One dalam kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi yang dibangun pada berita kedua media tersebut. Dalam menganalisi sebuah teks, hal pertama yang akan dilakukan adalah *transkrip*. Kegiatan yang mengubah data dari bentuk audio atau video ke dalam bentuk tulisan. Hasil *transkrip* berupa teks atau tulisan rekaman audio atau video yang disajikan apa adanya. Hal yang diperhatikan dalam model ini yaitu penonjolan yang dibentuk untuk membuat sebuah berita. Penonjolan ini nantinya akan membentuk sebuah *frame* pemberitaan berdasarkan pemilihan fakta dan narasumber yang dilakukan penulis dalam membuat berita.

Kedua level visual, yaitu menganalisis gambar yang ada pada video berita di Metro TV dan TV One. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana ideologi yang dibangun oleh kedua media tersebut melalui cuplikan gambar yang ditampilkan.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, dan masing-masing bab memiliki pembahasan yang berbeda. Pada bab 1 menjelaskan latar belakang masalah serta rumusan masalah tentang pemberitaan kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Metro Tv dan TV One. Kemudian peneliti juga akan memaparkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori serta metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam bab 2 akan dibahas sejarah media televisi serta profil ringkas obyek penelitian yaitu Metro TV dan TV One, yang masing-masing berisi visi-misi dari kedua media televisi tersebut. Selain itu pada bab 2 ini juga akan dijelaskan mengenai Konglomerasi Media di Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Pada bab 3, peneliti akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian dan analisis dari data yang telah diperoleh, serta membandingkan perbedaan yang muncul dari analisis data. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi media Metro TV dan TV One dalam mengkonstruksi pemberitaannya mengenai kasus papa minta saham PT Freeport Indonesia terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jussuf Kalla.

Pada bab 4 yaitu penutup, peneliti akan menyajikan kesimpulan dari hasil skripsi yang telah dibuat, kemudian peneliti akan memberikan saran sebagai penilaian atas penelitian yang telah dilakukan.